

<https://ejurnal.fe.ugk.ac.id>

EXCESS
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi

Fakultas
 Ekonomi
 Universitas Gunung
 Kidul

Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Ethical Theory and Application of Business Ethics in Sharia-Based Financial Institutions

Desti Ulya ^{1*}, Fakhrunisa Arifatun Ni'mah ², Sarpini ³

¹²³ UIN Saizu Purwokerto. Jl. A.Yani No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,
 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

*Coressponding Author. E-mail: 224110202009@mhs.uinsaizu.ac.id

Received (artikel dikirim): 08/12/2024; Revised (artikel revisi):14/12/2024; Accepted (artikel diterima): 16/12/2024

Abstrak : Etika adalah bidang filosofi yang mempelajari tentang nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai teori etika telah dikembangkan untuk membantu memahami dan memikirkan tindakan manusia dalam konteks pribadi dan sosial. Teori-teori etika membantu menentukan standar moral. Dalam hal pengambilan keputusan moral, terdapat berbagai perspektif, seperti etika deontologis, etika utilitarianisme, etika teleologis, dan etika hedonisme selain itu, pembagian etika menjadi beberapa jenis, seperti etika normatif, etika deskriptif, dan etika aplikatif, memungkinkan kita untuk lebih memahami kompleksitas masalah moral yang dihadapi diberbagai bidang, seperti bisnis dan kesehatan.

Kata Kunci: Etika, Prinsip etika, Lembaga keuangan

Abstract : Ethics is a field of philosophy that studies the values and norms that govern human behavior in daily life. Various ethical theories have been developed to help understand and think about human actions in both personal and social contexts. Ethical theories help determine moral standards. In terms of moral decision-making, there are various perspectives, such as deontological ethics, utilitarianism ethics, teleological ethics, and hedonism ethics In addition, the division of ethics into several types, such as normative ethics, descriptive ethics, and applied ethics, allows us to better understand the complexity of moral problems faced in various fields, such as business and health.

Keywords: Ethics, Ethical principles, Financial institutions

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di dunia modern yang kompleks ini, di mana globalisasi seringkali menekankan batasan moral, etika bisnis semakin penting. Contohnya, tindakan tidak etis di sektor keuangan, seperti

manipulasi data atau ekspektasi berlebihan, dapat berdampak besar pada stabilitas perekonomian dunia. Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang lebih menekankan prinsip moral dan keadilan. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran Islam, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori etika dalam konteks

lembaga keuangan syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang menegaskan pentingnya nilai moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalamnya meliputi keadilan, transparansi, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), serta larangan terhadap *riba* (bunga), yang menjadi dasar dalam pengoperasian lembaga keuangan syariah. Penerapan etika bisnis di lembaga keuangan syariah melibatkan berbagai prinsip transaksi yang sejalan dengan hukum Islam. Contohnya, terdapat prinsip pembiayaan seperti *mudharabah* (jual beli) dan *musyarakah* yang menekankan kerjasama serta bagi hasil antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Salah satu elemen krusial yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan dalam produk dan layanan keuangan, sehingga nasabah dapat mengerti risiko dan keuntungan dengan jelas. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menjamin bahwa investasi yang dilakukan mendukung kegiatan yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam aspek

ekonomi maupun sosial. Implementasi yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, serta menjadikannya sebagai alternatif yang lebih berorientasi manusia dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Langkah ini juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Lembaga ini berkomitmen untuk mendukung usaha ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika investasi khusus ditujukan padanya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan moneter tetapi juga keinginan sosial. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut, serta untuk menawarkan solusi yang dapat membantu mereka beroperasi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Etika sebagai cabang filsafat mempelajari nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia, serta membantu dalam pengambilan keputusan moral. Berbagai teori etika, seperti deontologis, utilitarianisme, dan hedonisme, memberikan kerangka untuk

memahami tindakan dalam konteks sosial dan bisnis. Penerapan prinsip etika dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum Islam tetapi juga melibatkan transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan integritas. Namun, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan etika bisnis. Tantangan tersebut meliputi pemahaman yang tidak merata tentang prinsip syariah di kalangan pemangku kepentingan, persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional, keterbatasan produk keuangan syariah yang sesuai dengan etika, serta kurangnya pengawasan yang ketat. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga ini dapat mengatasi tantangan tersebut dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam operasional mereka untuk mencapai kinerja yang baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana teori etika dan prinsip-prinsip etika yang di terapkan di lembaga keuangan yang harus dimiliki oleh para karyawannya untuk keberlangsungan operasional perusahaan.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Etika

Etika, berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti karakter atau kebiasaan, adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai baik dan buruk serta kewajiban moral individu dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk serta tentang kewajiban dan hak. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak dan dapat pula diartikan sebagai nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.

2. Teori-Teori Etika

2.1. Teori Deontologis

Teori deontologis berasal dari bahasa Yunani "*deon*" yang berarti "diwajibkan" mengatakan bahwa benar atau salahnya suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat-akibatnya kecuali ada cara bertindak yang hanya terlarang atau wajib. Kelemahan dalam teori ini adalah sifat

mengharuskannya tidak dapat ditawarkan.

Filsuf yang pemikirannya selalu dikaitkan dengan etika deontologi adalah Immanuel Kant (1724-1804). Melalui karyanya *Groundwork of the Metaphysics of Moral*, Kant menyatakan bahwa satu-satunya yang baik tanpa pengecualian adalah kehendak baik; yakni kehendak untuk melakukan apa yang menurut pertimbangan kita (alasan) merupakan kewajiban (tugas) moral kita. (Surajio: 2023).

2.2. Teori Utilitarianisme

Istilah utilitarianisme berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori utilitarianisme suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Utilitarianisme mendefinisikan kebaikan dan kejahatan dalam kaitannya dengan konsekuensi kesenangan dan rasa sakit. Utilitarianisme sangat bersifat outcome oriented, karena menitikberatkan pada nilai akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Terdapat dua jenis utilitarianisme yakni utilitarianisme perbuatan dan utilitarianisme peraturan. Utilitarianisme perbuatan atau utilitarianisme tindakan, adalah teori etika yang menekankan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan harus dinilai dari hasil atau akibatnya. Suatu tindakan

dianggap baik jika dapat meningkatkan kebahagiaan dan meringankan penderitaan bagi sejumlah orang. Sementara utilitarianisme peraturan mendasarkan bahwa suatu norma, peraturan, atau hukum baik secara moral jika norma atau peraturan tersebut mendatangkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang yang terkena dampak peraturan tersebut (Urbanus:2019).

2.3 Teori Hedonisme

Hedonisme merupakan teori etika yang memfokuskan diri pada kebahagiaan dan kesenangan pribadi. Bagi Epicurus (341-270 SM) dan Epicurean (pengikut Epikurus) tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh keamanan, kesenangan, atau kebahagiaan abadi. (Urbanus:2019)

2.4 Teori Universalisme

Univeralisme menitikberatkan pada maksud (tujuan) dari pada keputusan atau tindakan. Prinsip nilai yang mendasari univeralisme adalah prinsip “catagorical imperative” (kewajiban mutlak) dari Kant. (Disfa:2019)

2.5 Teori Egoisme

Rachels memperkenalkan dua konsep berhubungan dengan egoisme, yaitu *egoisme psikologis* dan *egoisme etis*. Kedua konsep ini tampak mirip namun keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. *Egoisme psikologis* adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkepentingan diri (*selfish*). Menurut

teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur hanyalah ilusi. Kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. *Egoisme etis* adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Jadi, yang membedakan tindakan berkuat diri dengan tindakan untuk kepentingan diri adalah pada akibatnya terhadap orang lain. (Sukrisno:2018)

2.6 Teori Hak

Teori hak adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana dikatakan oleh Bertens, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. (Sukrisno:2018) Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang, dan bagaimana hak tersebut harus dihargai.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber ototritas, yaitu: hak hukum (*legal right*), hak moral atau

kemanusiaan (*moral, human right*), dan hak kontraktual (*contractual right*). *Hak legal* adalah hak yang didasarkan atas sistem/yuridiksi hukum suatu negara. *Hak moral* dihubungkan dengan pribadi manusia secara indivisu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat. *Hak kontraktual* mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Sukrisno:2018)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni berupa riset kepustakaan menggunakan metode analisis isi (*content analisys*). Isi setiap materinya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik pembahasan yang berhasil di kumpulkan, di telaah, dianalisis, dan di sintesis guna menjawab pertanyaan secara lengkap.

HASIL DAN ANALISA

Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta kewajiban2an moral individu dalam hidup bermasyarakat. Dalam menerapkan etika bisnis dalam suatu Perusahaan pasti

memiliki tantangan dan juga dampak yang harus dihadapi.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Lembaga keuangan syariah harus mematuhi aturan hukum Islam yang melarang praktik *riba*, yang merupakan bunga, *maysir*, yang merupakan perjudian, dan *gharar*, yang merupakan pelanggaran. Setiap barang dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus memenuhi persyaratan syariah. Produk *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan ide tentang hasil yang adil sesuai dengan peraturan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dimiliki oleh lembaga Pengawas keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua barang dan operasi lembaga tersebut sesuai dengan hukum syariah. DPS juga memberikan fatwa dan pedoman bagi lembaga tersebut untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan hukum Islam (Soewarno, R. 2017).

2. Transparansi dan Keterbukaan

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka. Informasi yang akurat dan mudah dipahami harus diberikan kepada nasabah tentang barang, biaya, dan risiko yang terkait. Lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan atas setiap

transaksi yang dilakukan. Produk pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* harus dijelaskan secara terbuka, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan risiko. Lembaga keuangan syariah juga harus mengungkapkan informasi tentang biaya atau komisi yang dikenakan atas layanan mereka (Mulyadi, A. 2019).

3. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan dalam bisnis syariah mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara adil dan seimbang. Menurut prinsip syariah, tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi atau kesepakatan. Dalam bisnis syariah, prinsip keadilan mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara adil dan seimbang. Menurut prinsip syariah, dalam setiap transaksi atau kesepakatan, tidak ada pihak yang dirugikan (Santoso, T. 2020).

4. Tanggung Jawab Sosial

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa operasi mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan karena mereka memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar, termasuk mendorong perekonomian masyarakat, mengelola zakat, dan menjalankan program yang mendukung kesejahteraan umat. Lembaga keuangan syariah dapat membantu sektor

usaha mikro dan kecil (UMKM) atau mendukung program sosial dan pendidikan yang menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang (Fauzi, A. 2018).

5. Integritas dan Kejujuran

Integritas dan kejujuran merupakan nilai fundamental dalam etika bisnis syariah. Lembaga keuangan syariah harus menjaga integritas dalam setiap keputusan dan transaksi yang dilakukan. Kejujuran dalam komunikasi dan dalam penyampaian informasi kepada nasabah juga sangat penting. Pegawai dan manajemen lembaga keuangan syariah harus berkomitmen untuk tidak menyembunyikan informasi penting dari nasabah dan untuk selalu mengutamakan kepentingan nasabah dalam setiap tindakan mereka (Rahardjo, R. 2021).

6. Keberlanjutan dan Etika Lingkungan

Prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan semakin penting dalam bisnis syariah. Lembaga keuangan syariah harus berkomitmen untuk mendukung proyek yang mendukung keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan selain menghasilkan keuntungan finansial. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan dana untuk proyek yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan, seperti inisiatif yang mengadopsi energi terbarukan atau bentuk tindakan ramah lingkungan lainnya (Sulaiman & Hidayat, 2022).

7. Pencegahan Konflik Kepentingan

Lembaga keuangan syariah harus menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan nasabah atau lembaga itu sendiri. Setiap keputusan bisnis yang diambil harus didasarkan pada kepentingan lembaga dan pelanggan, bukan kepentingan pribadi. Pegawai dan manajer lembaga keuangan syariah harus menghindari mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti menggunakan informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi (Imran & Ali, 2016).

Tantangan dalam Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pemahaman yang Tidak Merata tentang Prinsip Syariah

Salah satu masalah utama dalam penerapan etika bisnis di lembaga keuangan syariah adalah pemahaman yang kurang tentang prinsip-prinsip syariah. Banyak pemangku kepentingan, termasuk nasabah, lembaga pengelola, dan bahkan regulator, kurang memahami prinsip-prinsip syariah dalam dunia keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun lembaga tersebut mengklaim sebagai lembaga keuangan syariah. Misalnya, produk keuangan yang ditawarkan seringkali tidak

sesuai dengan prinsip moral yang dianut oleh prinsip syariah (Maulana, T., & Hadi, S. (2020).

2. Persaingan yang Ketat dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Lembaga keuangan syariah biasanya bekerja di pasar yang sangat kompetitif, bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak pengalaman. Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan syariah terkadang merasa terdorong untuk melakukan perubahan dalam praktik bisnis mereka yang dapat mengganggu etika syariah, seperti menggunakan instrumen keuangan yang lebih menguntungkan tetapi bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan dilema etis. Organisasi syariah berusaha untuk mempertahankan persaingan sambil mempertahankan prinsip syariah (Kadir, A. 2017).

3. Keterbatasan Produk Keuangan Syariah

Banyak produk keuangan syariah yang belum memenuhi standar etika syariah secara menyeluruh atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Salah satu masalah besar bagi lembaga keuangan syariah adalah jumlah produk yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan cukup untuk memenuhi persyaratan pasar modern. Lembaga keuangan syariah seringkali harus memilih

produk yang tidak transparan atau sulit untuk dipublikasikan, yang dapat menimbulkan masalah etika, untuk memenuhi kebutuhan klien (Safri, N., & Salim, H. 2019).

4. Kurangnya Pengawasan dan Regulasi yang Ketat

Selain itu, kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang merupakan masalah yang signifikan. Penyimpangan prinsip syariah dapat dengan mudah terjadi jika lembaga keuangan syariah tidak melakukan pengawasan dengan ketat dan konsisten. Tidak adanya peraturan yang jelas dan sistem kontrol yang kuat memungkinkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis syariah, yang dapat merugikan reputasi dan kelangsungan lembaga (Lubis, M. 2018).

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Salah satu tantangan utama lainnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengintegrasikan prinsip etika bisnis dengan prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan syariah tidak memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang ini, yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip etika syariah, serta kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan (Safri, N., & Salim, H. 2019).

Dampak Penerapan Etika terhadap Kinerja di Lembaga Keuangan

1. Peningkatan Kinerja Keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika, seperti mengungkapkan nilai zakat, meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Sebagai hasil dari penelitian, indeks zakat meningkatkan kinerja bank, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah.

2. Peningkatan Kepercayaan Nasabah

Etika bisnis Islam berkontribusi pada peningkatan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, lembaga dapat membangun reputasi yang baik, sehingga nasabah lebih cenderung menggunakan produk-produk syariah seperti pembiayaan mudharabah.

3. Pengurangan Informasi Asimetri

Penerapan etika membantu mengurangi informasi asimetri antara bank dan nasabah. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko moral hazard, yang dapat mempengaruhi hasil investasi dan bagi hasil yang diterima oleh lembaga keuangan.

4. Kepuasan dan Komitmen Karyawan

Etika kerja Islam berhubungan positif dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang

menerapkan etika yang kuat cenderung merasa lebih puas dan berkomitmen, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka.

5. Reputasi dan Daya Saing

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan etika secara konsisten dapat membangun reputasi yang kuat di pasar. Reputasi ini berfungsi sebagai daya saing, menarik lebih banyak nasabah dan investor, serta memperkuat posisi lembaga dalam industri keuangan syariah.

Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Etika

Kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika terdapat dalam ISO 26000. ISO 26000 merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dengan tujuan memberikan arahan mengenai tanggung jawab sosial. Berbeda dengan standar ISO yang lain, ISO 26000 tidak ditujukan untuk sertifikasi, melainkan sebagai panduan bagi organisasi di berbagai sektor untuk melaksanakan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Tujuh prinsip ISO 26000:

1. Akuntabilitas

Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang terdampak oleh kegiatan usahanya. Oleh

karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil dengan tepat.

2. Transparansi

Sebuah organisasi atau perusahaan harus dapat menyampaikan keputusan, kegiatan, dan dampaknya dengan cara yang jelas dan transparan.

3. Perilaku Etis

Perilaku organisasi atau perusahaan seharusnya selaras dengan nilai-nilai etika, kejujuran, keadilan, dan integritas.

4. Menghormati Kepentingan Pemangku Kepentingan

Perusahaan tidak hanya memprioritaskan kepentingan korporasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

5. Menghormati Aturan Hukum

Dalam melaksanakan langkah-langkahnya, sebuah organisasi atau perusahaan harus mempertimbangkan dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

6. Menghormati Norma Perilaku Internasional

Seiring dengan kepatuhan terhadap hukum, sebuah perusahaan atau organisasi juga harus mematuhi norma-norma perilaku internasional.

7. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Setiap perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban untuk menghormati

dan mendukung hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia.

Tujuh Subjek Inti (Core Subjects) ISO 26000

1. Tata Kelola Organisasi (Tata Kelola Organisasi)

Perusahaan atau organisasi perlu menerapkan tata kelola yang baik dengan menjaga keseimbangan dalam kondisi sosial. Dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas, transparansi, etika, dan perhatian terhadap pemangku kepentingan menjadi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan.

2. Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia)

Perusahaan atau organisasi juga harus berperan aktif dalam mengurangi tindakan diskriminasi, penyiksaan, dan eksploitasi. Contohnya, mereka perlu mengambil langkah-langkah untuk menghindari risiko dan melindungi komunitas yang rentan.

3. Ketenagakerjaan (Praktik Ketenagakerjaan)

Perusahaan atau organisasi harus memperhatikan hak-hak tenaga kerja yang ada. Langkah ini penting untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, yang dapat mengakibatkan eksploitasi dan dampak negatif bagi pekerja. Sebagai contoh, perlu ada perlindungan bagi tenaga kerja terkait keamanan dan kesehatan mereka.

4. Lingkungan

Perusahaan atau organisasi perlu berkomitmen untuk melakukan transisi yang jelas dalam pola produksi mereka. Dari penggunaan bahan atau proses yang tidak berkelanjutan, mereka harus secara bertahap beralih kepada proses dan sumber daya yang lebih berkelanjutan.

5. Praktik Kegiatan Institusi yang Sehat (Praktik Operasional yang Adil)

Diperlukan penerapan praktik kegiatan sehat di seluruh institusi, agar dapat mengembangkan praktik bisnis yang baik. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun sistem sosial yang berkelanjutan.

6. Konsumen (*Consumer Issues*)

Pelayanan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai metode. Ini mencakup penyediaan informasi yang relevan, perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan konsumen, serta jaminan privasi yang memadai.

7. Pengembangan Masyarakat

(Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas)

Kegiatan yang dirancang dengan tepat juga memperhatikan keberlanjutan sosial. Sebagai contoh, program-program yang diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong kewirausahaan, sehingga pada

akhirnya dapat menumbuhkan kemandirian dalam komunitas.

Manfaat Penerapan ISO 2600

1. Reputasi Positif

Meningkatkan citra organisasi sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berintegritas.

2. Keunggulan Kompetitif

Memberikan nilai tambah pada produk dan layanan melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

3. Kepuasan Karyawan dan Nasabah

Mendorong loyalitas dengan menciptakan lingkungan yang etis dan adil bagi semua pihak.

4. Keberlanjutan Bisnis

Mengelola risiko sosial dan lingkungan dengan lebih efektif, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap kelangsungan bisnis.

Dalam penerapannya, lembaga keuangan sering kali menggunakan ISO 26000 yang dijadikan sebagai pedoman untuk:

1. Mematuhi Aturan Hukum dan Norma Internasional

Lembaga keuangan perlu mengikuti regulasi yang berlaku baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan mengadopsi ISO 26000, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip global, seperti penanganan korupsi dan perlindungan hak

pekerja, tanpa mengabaikan standar yang berlaku di tingkat lokal.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk menyajikan laporan yang jelas mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas mereka. Dengan demikian, kepercayaan dapat terjalin dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis.

3. Menghormati Hak Asasi Manusia

Standar ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam setiap aspek operasional, termasuk dalam rantai pasokan. Lembaga keuangan yang mengikuti ISO 26000 rutin melakukan audit untuk memastikan bahwa praktik mereka tidak melanggar hak asasi manusia, seperti kerja paksa atau diskriminasi.

4. Mendorong Praktik Bisnis Berkelanjutan

ISO 26000 memberikan dukungan bagi lembaga keuangan dalam mengembangkan kebijakan investasi yang berkelanjutan, yaitu kebijakan yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Ini termasuk menghindari pendanaan untuk proyek-proyek yang dapat merusak ekosistem.

Persepsi Stakeholder terhadap Etika Bisnis Lembaga Keuangan

Persepsi stakeholder terhadap etika bisnis di lembaga keuangan menggambarkan pemahaman para pemangku kepentingan termasuk nasabah, karyawan, investor, dan masyarakat umum terhadap nilai dan prinsip perusahaan. Lembaga keuangan yang menerapkan etika bisnis dengan baik cenderung meraih tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari stakeholder. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat industri keuangan sangat bergantung pada reputasi dan kredibilitas.

Para pemangku kepentingan mengharapkan lembaga keuangan untuk menunjukkan integritas melalui transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerbitkan laporan keuangan yang akurat dan mudah diakses, yang dapat memperkuat persepsi positif di masyarakat. Sebaliknya, praktik bisnis yang tidak etis, seperti manipulasi data atau konflik kepentingan, dapat merusak kepercayaan dan berdampak negatif pada keberlanjutan bisnis.

Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab sosial serta pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan juga berperan penting dalam membentuk persepsi yang baik. Mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam

strategi bisnis tidak hanya dapat meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan, tetapi juga dapat mendorong keberlanjutan dan daya saing organisasi (Ilham & Bambang).

Studi Perbandingan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan

Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah

Lembaga keuangan konvensional umumnya mengikuti standar etika yang berlandaskan pada prinsip-prinsip global, seperti *Good Corporate Governance* (GCG). Standar ini ditujukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap nasabah. Meskipun demikian, tantangan sering kali muncul, mengingat tujuan utama lembaga-lembaga ini adalah profitabilitas, yang terkadang dapat mengesampingkan nilai-nilai etis yang lain.

Sebaliknya, lembaga keuangan syariah mendasarkan etika bisnis mereka pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*ash-shidiq*), dan kesetaraan (*al-musawah*). Dalam konteks ini, etika bukan hanya diupayakan untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai maqasid syariah—tujuan syariah yang mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi

berbagai tantangan, termasuk kurangnya konsistensi dalam praktik dan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari regulator agar nilai-nilai syariah tetap terjaga.

Sebagai contoh, penelitian terhadap lembaga keuangan seperti Bank BNI Syariah dan BTN Syariah mengungkapkan adanya upaya penerapan kode etik syariah dalam operasional mereka. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pengintegrasian nilai-nilai syariah. Bank yang memiliki sistem lebih terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Meskipun norma-norma etika bisnis telah diatur dengan baik, pelaksanaannya membutuhkan perhatian khusus dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moralitas. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan moral bagi pengelolanya, guna membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat.

Implikasi Etika Bisnis terhadap Keberlanjutan Lembaga Keuangan

Penerapan etika bisnis memiliki dampak strategis yang mendalam bagi keberlanjutan lembaga keuangan, mencakup aspek operasional, reputasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Berikut adalah rincian mengenai dampaknya:

1. Meningkatkan Kepercayaan

Stakeholder

Etika bisnis berperan penting dalam memperkuat kepercayaan para pelanggan, investor, dan mitra bisnis kepada lembaga keuangan. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi dalam operasional, pelaporan keuangan, serta pengambilan keputusan yang adil.

Sebagai contoh, lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan investasi berkelanjutan berdasarkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dianggap lebih bertanggung jawab. Hal ini membuat mereka lebih menarik bagi investor, baik institusi maupun individu.

2. Mengurangi Risiko Reputasi dan Hukum

Lembaga keuangan yang mengedepankan praktik bisnis yang etis cenderung menghadapi lebih sedikit masalah hukum dan skandal yang dapat merusak citra mereka. Sebagai contoh, lembaga asuransi yang menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam penanganan klaim dapat menghindari konflik hukum dengan pelanggan.

3. Mendukung Pencapaian Tujuan Keberlanjutan Global

Lembaga keuangan memiliki peran yang krusial dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dengan memberikan pembiayaan pada sektor-sektor yang

berfokus pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur yang ramah lingkungan, lembaga ini berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasionalnya.

4. Meningkatkan Loyalitas Pelanggan

Pelanggan cenderung merasa lebih loyal terhadap lembaga yang mengutamakan nilai-nilai etis. Sebagai contoh, bank yang aktif melibatkan komunitas dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan mendapatkan citra yang lebih positif di mata masyarakat.

5. Keunggulan Kompetitif

Etika bisnis menjadi nilai tambah yang membedakan lembaga keuangan satu dengan lainnya. Perusahaan yang dikenal karena praktik etisnya memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar global.

Secara keseluruhan, etika bisnis bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi untuk mencapai keberlanjutan. Lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis mampu menciptakan sinergi antara tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tujuan ekonomi, sehingga mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

DISKUSI

Diskusi pada penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis dalam lembaga

keuangan berbasis syariah terhadap para karyawannya untuk operasional perusahaan.

Menyoroti pentingnya nilai-nilai moral dalam operasional mereka. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ketat, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kita yaitu pentingnya penerapan etika bisnis dalam lembaga keuangan syariah, yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks yang lebih luas, etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang mendasari setiap transaksi dan interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah.

Pertama-tama, lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Hal ini menjadi landasan utama dalam operasional mereka, di mana setiap produk dan layanan harus sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, produk pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menekankan pada kerjasama dan pembagian hasil yang adil antara pihak-

pihak yang terlibat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi.

Selain itu, transparansi dan keterbukaan merupakan aspek krusial dalam etika bisnis. Lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan mereka. Ini termasuk menjelaskan risiko dan biaya yang mungkin timbul dari setiap transaksi. Dengan cara ini, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merasa lebih percaya terhadap lembaga tersebut.

Tanggung jawab sosial juga menjadi bagian penting dari etika bisnis di lembaga keuangan syariah. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti mendukung usaha mikro dan kecil serta mengelola zakat dengan baik. Dengan menjalankan program-program sosial yang bermanfaat, lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penerapan etika bisnis tidak tanpa tantangan. Lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam memastikan pemahaman yang konsisten tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan semua pemangku kepentingan. Selain itu, persaingan ketat dengan lembaga

keuangan konvensional dapat mempengaruhi keputusan bisnis mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk terus meningkatkan pemahaman tentang etika dan prinsip-prinsip syariah di kalangan karyawan serta nasabah.

Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis dalam lembaga keuangan syariah sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga dan nasabah. Dengan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih berorientasi manusia dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Keberhasilan dalam menerapkan etika bisnis akan membantu lembaga-lembaga ini tidak hanya mencapai kinerja finansial yang baik tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. (2024). Mengukur Kinerja Sosial dan Etika Bisnis dengan Standar ISO 26000-Saka Mitra Nusantara, Mei. Diakses pada 5 Desember 2024 dari <https://sakamitranusantara.co.id/kinerja-sosial-dan-etika-bisnis-standar-iso-26000/>.
- Astuti, M., & Vanica S. (2023). "Pengaruh Pengungkapan Nilai Etika Islam terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol 5 (1), 233-234.
- Dasar, Sekolah, and Pendidikan Guru. "BAHAN AJAR ETIKA UMUM DAN PROFESI GURU". n.d
- Efendi, B., & Trihudyatmanto. (2021). "PERAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MEMBANGUN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol 8 (1), 25
- "ETIKA KOMUNIKASI VERBAL DALAM PENULISAN BERITQ DIMEDIA ONLINE 1". n.d
- Fauzi, A. (2018). *Prinsip-prinsip Etika dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- FEB UGM. (2023). Penerapan Etika dalam Membangun Keberlanjutan Bisnis-Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Juli. Diakses pada 5 Desember dari <https://www.feb.ugm.ac.id/en>
- Hidayat, Habib. (2024). ISO 26000: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-Myrobin.id, Januari. Diakses pada 5 Desember 2024 dari <https://myrobin.id/untuk-bisnis/iso-26000/>.
- ICICERT. (2024). 7 Prinsip Fundamental ISO 26000: 2010 Untuk Memajukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-ICICERT. Juli. Diakses pada 5

- Desember 2024 dari <https://icicert.com/7-prinsip-fundamental-iso-260002010-untuk-memajukan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/> Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 12(2), 105-122.
- Imran, M., & Ali, S. (2016). *Teori dan Praktik Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jannah, SM. "Konsep Etika Sosial", 2016, 1-23.
- K. Bertens. "Pengantar Etika Bisnis". 2013, 30-34.
- Lubis, M. (2018). *Etika Bisnis dalam Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latifa, S. E., Askandar, H. N., & Afifudin. "Pengaruh Pengungkapan Nilai Etika Islam terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi Akuntansi, 43.
- Ningsih, E.R. (2017). "Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis pada Perbankan Syari'ah di Indonesia". Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 10 (1).
- Nurhuzaini, P., Rokan, M. K., & Syahriza, R. (2023). "Pengaruh Etika Kerja Islam dan Religiusitas terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah." Jurnal Nasional El-Iqtishod Ekokomi Syariah IPI Gowa, Vol 7 (1), 54.
- Maulana, T., & Hadi, S. (2020). "Tantangan Penerapan Etika Bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah di
- Maulana, I., & Haryadi, B. (2022). "Etika Bisnis, Corporate Governance, dan Stakeholder". Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill, Vol 2 (2).
- Senesca ESC. (2023). ISO 26000: The Unsung Hero of ESG Standards-Senesca ESG, Oktober. Diakses pada 5 Desember 2024 dari <https://senecaesg.com/id/insights/iso-26000-the-unsung-hero-of-esg-standards/>.
- Soewarno, R. (2017). *Etika Bisnis Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, D. S. (2023). "PENGARUH ETIKA BISNIS TERHADAP KEBERLANJUTAN INDUSTRI ASURANSI". Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 6 (1).
- Mulyadi, A. (2019). *Prinsip-prinsip Keuangan Syariah dan Etika Bisnis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kadir, A. (2017). "The Role of Ethics in Islamic Banking: A Conceptual Framework." International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(4), 500-515.
- Khumaira, N. A. (2023). 7 Dampak Etika Bisnis pada Keberlanjutan dan Reputasi Perusahaan-Otak Kanan, November. Diakses pada 5 Desember 2024 dari <https://otakkanan.co.id/dampak-etika-bisnis-pada-reputasi-perusahaan/>.

- Rahardjo, R. (2021). *Etika Profesional dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, T. (2020). *Keuangan Syariah: Teori, Praktik, dan Penerapannya dalam Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sulaiman, R., & Hidayat, S. (2022). *Praktik Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Safri, N., & Salim, H. (2019). *Keuangan Syariah: Teori dan Praktik dalam Perspektif Etika Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Yunita, W. & Brawijaya, A. (2019). "PERBANDINGAN PENERAPAN KODE ETIK SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BANK BNI DA BTN SYARIAH)". *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 5 (1).